

IMPLEMENTASI KERJASAMA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DAN LEMBAGA PERBATASAN DI INDONESIA

Angga Maulana Adha Sitorus

Politeknik Imigrasi
alansitorus05@gmail.com

Arif Satria Hunianto

Politeknik Imigrasi
arifsatria094@gmail.com

Syarif Hidayatullah

Politeknik Imigrasi
syarifh7.sh@gmail.com

ABSTRACT

The Directorate General of Immigration is an example for other agencies in terms of developing innovations or other things that are able to increase the effectiveness of public services in Indonesia. One of them is the cooperation between the Directorate General of Immigration and several border institutions in Indonesia. Institutions that are in direct contact with the border between Indonesia and other existing countries such as Customs and the National Border Agency of the State. The establishment of the Cooperation is to overcome the abuse of authority by foreigners in Indonesia such as the smuggling of illegal goods, humans or even the existence of terrorism associations. With the existing cooperation, it is hoped that it can be a preventive step for possible violations that occur. In this study, it will be discussed about the implementation of the Cooperation and what future innovations can be done to improve existing cooperation. This research uses normative research methods with an approach that is carried out on the basis of materials to study theoretical problems related to concepts, views, principles, legal doctrines, legal rules and systems. So as to conclude that the implementation of existing cooperation between the Directorate General of Immigration and Border Institutions in Indonesia is effective or not

Keywords : Directorate General of Immigration, Borders, Cooperation

ABSTRAK

Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan contoh bagi instansi lain dalam hal pengembangan inovasi ataupun hal lain yang mampu meningkatkan efektifitas pelayanan publik di Indonesia. Salah satunya ialah dengan adanya Kerjasama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan beberapa Lembaga perbatasan di Indonesia. Lembaga yang bersentuhan langsung dengan perbatasan antara Indonesia dan negara lain yang ada seperti Bea Cukai dan Badan Nasional Perbatasan Negara. Terbentuknya Kerjasama tersebut ialah untuk menanggulangi adanya penyalahgunaan wewenang oleh orang asing yang ada di Indonesia seperti penyelundupan barang-barang ilegal, manusia atau bahkan keberadaan perkumpulan terorisme. Dengan adanya Kerjasama yang ada tersebut, diharapkan dapat menjadi langkah preventif bagi kemungkinan pelanggaran yang terjadi. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai implementasi Kerjasama tersebut serta inovasi apa kedepannya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Kerjasama yang ada. Penelitian ini memakai metode penelitian normatif dengan pendekatan yang dilakukan atas dasar bahan untuk mempelajari masalah-masalah teori yang berkaitan dengan konsep, pandangan, asas, doktrin hukum, kaidah dan sistem hukum. Sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan Kerjasama yang ada antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Lembaga Perbatasan di Indonesia berjalan efektif atau tidak

Kata Kunci : Direktorat Jenderal Imigrasi, Perbatasan, Kerjasama

I. PENDAHULUAN

Imigrasi adalah salah satu sektor terpenting di suatu negara dalam aspek berurusan dengan orang asing. Penampilan petugas imigrasi lebih menakutkan daripada petugas polisi di mata orang asing mana pun terutama jika mereka memiliki masalah seperti mereka tahu bahwa izin tinggal mereka overstay atau mereka telah melakukan kejahatan. Selain itu, sebagai salah satu negara yang memiliki banyak lokasi wisata, Indonesia dituntut untuk memiliki pelayanan yang kuat dan berkualitas terhadap masyarakat. Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab untuk mengurusnya adalah Direktorat Jenderal Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang mempunyai tugas utama untuk memberikan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keimigrasian. Dalam pelaksanaan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, Direktorat Jenderal Imigrasi terintegrasi dengan lembaga lain seperti Kepabeanan, Karantina, dan BNPP. Kehadiran lembaga lain di perbatasan Indonesia tentunya membantu pihak imigrasi untuk mengawal perbatasan dan menjaga pintu gerbang negara melalui tugas dan fungsinya masing-masing. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) adalah Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Kawasan Perbatasan dalam pengertian Undang-undang

Negara Nomor 43 Tahun 2008. BNPP adalah badan non struktural yang dipimpin oleh seorang Direktur Badan yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Hal ini penting dikarenakan arus keluar masuk orang asing di Indonesia sangatlah masif melihat daya tarik dari Indonesia itu sendiri. Dalam hal ini, perbatasan memiliki peran penting sebagai *filter* pertama bagi pemerintah untuk memantau atau melakukan peningkatan pengamanan bagi orang yang ingin masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan wilayah suatu negara dipisahkan oleh batas wilayah negara lainnya dan berfungsi sebagai pembatas daerah kedaulatan suatu negara. Pengenalan dan pemahaman batas wilayah erat hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan, kesejahteraan dan pertahanan keamanan negara. Dengan adanya perbatasan atau biasa disebut dengan konsep border, negara dapat mengetahui dimana batas wilayah territorial masing-masing.

Manajemen perbatasan wilayah negara yang baik harus didasarkan atas dokumen perjanjian (*treaty*) dan dokumen lainnya yang terkait garis batas wilayah negara yang sudah jelas status hukumnya (*legal*). Manajemen akses sangat erat kaitannya dengan manajemen keamanan (*security management*) namun sering bersifat paradoks. Bila akses perbatasan dibuka seluas-luasnya, maka dari aspek keamanan harus dikelola dengan sangat baik. Dalam hal

connectivity, idealnya para pelintas batas harus dapat melintas garis batas dengan mudah, cepat dan aman. Pegawai pemerintah kedua negara seperti: bea cukai, polisi, imigrasi, jasa transportasi, pelayanan kesehatan perlu disiapkan secara baik. Tingkat keterbukaan akses sangat tergantung pada kebijakan pemerintah kedua negara.

Manajemen perbatasan sangat berhubungan dengan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasannya. Makna tepatnya bervariasi sesuai dengan konteks nasional tetapi biasanya berkaitan dengan peraturan, teknik dan prosedur yang mengatur kegiatan dan lalu-lintas yang melalui daerah atau zona perbatasan tertentu. Jasa penjagaan perbatasan, keimigrasian dan kepabeanan adalah aktor utama yang bertanggungjawab atas pengelolaan perpindahan orang dan barang melintasi batas-batas negara. Pada bagian keimigrasian, pihak keimigrasian bertanggungjawab melaksanakan restriksi masuk/keluar, menjamin sah atau tidaknya paspor/surat perjalanan, mengidentifikasi dan menyelidiki kriminalitas, dan memberi bantuan kepada orang-orang yang perlu dilindungi. Oleh karena itu, untuk membuat wajah imigrasi lebih menakutkan dan dihormati, imigrasi perlu bekerja sama dengan lembaga lain guna

meningkatkan efisiensi dari manajemen perbatasan yang ada di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif akan digunakan dalam proses penelitian ini dan akan didukung dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Arikunto berpendapat bahwasanya, metode penelitian merupakan cara utama yang diimplementasikan oleh seorang peneliti guna mencapai suatu tujuan penelitiannya dan menemukan jawaban atas permasalahan yang diajukan.¹ Sedangkan Sugiyono berpendapat, metode penelitian merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara dideskripsikan, dikembangkan, dibuktikan, menggunakan teori dan hal lain sebagai upaya pencegahan dan deteksi secara dini permasalahan yang di kehidupan manusia.² Penelitian ini mencoba menuangkan implementasi dari kerjasama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Lembaga Perbatasan yang ada di Indonesia yang diperoleh melalui Teknik pengolahan data penelitian yang akurat. Berikut tahapan yang akan dilakukan dalam proses pengolahan data:

1. Pemeriksaan Data

Tahap pertama yang harus dilakukan ialah melakukan pemeriksaan guna untuk

¹ S. Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012).

melihat apakah terdapat data yang kurang. Jika ada pengumpulan data masih terdapat data yang kurang, maka peneliti akan melakukan pengambilan data lainnya guna melengkapi pembahasan pada penelitian

2. Pengeditan Data

Tahap pengeditan data dilakukannya identifikasi antara data dan menghilangkan kesalahan dari data asli. Kesenjangan data dapat diisi dengan memperoleh atau memasukkan data untuk menghindari kesalahan data dalam penelitian.

3. Sistematisasi Data

Proses penyusunan data secara sistematis yang sesuai dengan penelitian yang bertujuan agar analisis data menjadi lebih mudah.

Selain itu, Teknik analisis data yang digunakan berupa metode analisis data kualitatif, dimana temuan pada penelitian dideskripsikan dengan menggunakan data dan fakta yang didapatkan. Hal ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan data dengan menggunakan kalimat – kalimat yang disusun secara sistematis dan rinci, serta menganalisis data dengan menggunakan penjelasan dan uraian kalimat sederhana yang dapat dibaca dan dipahami agar dapat dirangkum secara umum berdasarkan fakta – fakta tertentu sebagai kesimpulan penelitian.

III. PEMBAHASAN

3.1 Urgensi Adanya Kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi Dengan Lembaga Perbatasan Di Indonesia

Kebijakan luar negeri Indonesia menganut prinsip-prinsip kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif yang dikhususkan untuk kepentingan nasional. Merdeka artinya rakyat Indonesia tidak memihak atau ikut serta dalam kekuatan yang ingin bermusuhan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Sedangkan aktif berarti Indonesia tidak hidup sendiri, tetapi aktif dalam hubungan internasional dalam rangka mewujudkan keteraturan dunia. Dalam masalah kebijakan luar negeri, kepentingan langsung individu (dalam hal ini negara) juga tidak langsung. Untuk mendukungnya, pemerintah Indonesia memiliki Direktorat Jenderal Imigrasi atau Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai lembaga yang berinteraksi dengan orang asing. Undang-Undang Keimigrasian menyatakan bahwa pelayanan dan pengawasan keimigrasian didasarkan pada asas kebijakan selektif yang menyatakan bahwa orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga memusuhi rakyat dan Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Izin masuk dan keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

Untuk memenuhi pernyataan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi terintegrasi dengan instansi lain yang dapat memberikan bantuan dalam bentuk apapun bagi mereka. Manfaat dari integrasi antara lembaga dengan imigrasi, atau kerja sama imigrasi adalah dapat menangani kasus-kasus seperti perdagangan manusia, kejahatan terorganisir transnasional, atau bahkan terorisme. Terdapat 3 instansi yang biasanya bekerja sama dengan beberapa unit pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi, yakni

a. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri, Memberantas penyelundupan, Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara, dan sebagainya.

b. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Dengan hadirnya BNPP memberikan dampak yang cukup untuk melakukan pengelolaan perbatasan sesuai dengan aturan yang melekat di dalam dirinya. Walaupun masih belum maksimal melakukan tugasnya sebagai badan yang diberikan amanat untuk melakukan pengelolaan perbatasan akan tetapi peran yang dilakukan oleh BNPP baik pusat maupun di daerah telah memberikan kontribusi yang nyata.

c. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla)

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia adalah badan paramiliter negara yang bertugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi maritim Indonesia.³

Dalam hal ini, salah satu kasus yang akan disoroti adalah di mana ada pekerja migran non-prosedural yang masuk ke Arab Saudi dan Timur Tengah melalui modus melaksanakan haji dan umrah. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pekerja migran nonprosedural, diperlukan kerja sama yang terkoordinasi dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah sesuai dengan peran dan bidangnya. Untuk mencegah masalah seperti ini terjadi di tengah-tengah masyarakat yang merupakan pekerja migran non-prosedural yang akan mengarah pada

³ "Badan Keamanan Laut Republik Indonesia"

https://bakamla.go.id/profile/job_and_function
(diakses pada 1 November 2022, pukul 11.36)

perdagangan manusia, pemerintah membentuk satuan tugas khusus yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam memberantas kasus perdagangan manusia di Indonesia, Pemerintah Indonesia membentuk Satuan Tugas yaitu Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).⁴

Selain itu, bentuk nyata kerja sama keimigrasian di Indonesia sangat terlihat dengan adanya tim pemantau asing atau TIMPORA. Keberadaan TIMPORA menjadi momok bagi WNA yang berniat melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia karena anggota TIMPORA sendiri memiliki kedudukan yang sangat mampu melakukan penangkapan atau pemantauan terhadap WNA di Indonesia. Selain TIMPORA ada Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina atau CIQ, CIQ merupakan unsur instansi pemerintah yang terdiri dari Kantor Pabean, Kantor Imigrasi, Kantor Karantina Pertanian, Kantor Karantina Ikan, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan. CIQ memiliki tugas dan fungsi untuk membina dan memeriksa lalu lintas masuk dan keluar manusia, barang, dan

mahluk hidup lainnya di suatu negara, baik yang masuk maupun yang keluar demi menjunjung tinggi kewenangan pemerintah suatu negara.⁵ Last but not least, kerja sama konkret yang telah dilakukan adalah ketika Kantor Imigrasi Kelas 2 Atambua Pengendalian Perbatasan melaksanakan Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam rangka meningkatkan standar pelayanan keimigrasian berbasis teknologi informasi. Dari hasil kegiatan koordinasi di BNPP Wini dan BNPP Motamasin untuk mendukung dan akan membantu memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan standar pelayanan keimigrasian berbasis teknologi Informasi.⁶

Dalam hal ini, Munculnya Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai instansi yang menangani bidang keimigrasian di Indonesia membuat WNA semakin sadar akan kebijakan dan larangan tinggal di Indonesia. Itu karena hukum dan peraturan yang dapat menyebabkan orang asing yang bermasalah dideportasi atau bahkan dipenjara. Namun, untuk menegakkan aturan tersebut, Ditjen

⁴ Hertanto, 2005 "Human Trafficking: Akar Permasalahan dan Solusinya" Jakarta: Sinar Grafika

⁵ <https://merauke.imigrasi.go.id/sinergitas-ciq-customs-immigration-quarantine-kab-merauke-dalam-rangka-peringatan-ulang-tahun-ke-74-republik-indonesia/> Accessed on Thursday, 15 April 2021 18:55 P.M

⁶ Kanwil NTT, Bersama BNPP, Kanim Atambua Tingkatkan Standar Pelayanan Keimigrasian

Berbasis Teknologi Informasi, <https://ntt.kemenumham.go.id/berita-kanwil/berita-upt/4645-bersama-bnpp-kanim-atambua-tingkatkan-standar-pelayanan-keimigrasian-berbasis-teknologi-informasi> Accessed on Thursday, 15 April 2021 21:32 P.M

Imigrasi masih membutuhkan bantuan dari instansi lain, terutama instansi yang terkait dengan pengendalian perbatasan. Kebutuhan yang dimaksud Direktorat Jenderal Imigrasi adalah adanya kolaborasi antar instansi untuk membuat pekerjaannya menjadi lebih memadai dan efektif serta diharapkan dapat membuat instansi perbatasan lainnya menjadi lebih baik terhadap kerjasama itu sendiri.

Pasalnya, dalam 10 tahun terakhir, masih banyak kasus yang perlu diselesaikan bersama dengan lembaga perbatasan lainnya. Misalnya, selama periode Juni hingga Agustus 2015, Badan Narkotika Nasional telah mengungkap setidaknya 14 kasus dengan 23 tersangka (5 WNA Nigeria dan 18 WNI. Total barang bukti yang disita dari 14 kasus dengan 23 tersangka (5 WNA Nigeria dan 18 WNI) di atas sebanyak 103.816,4 gram sabu kristal. Seluruh jaringan kasus ini dikendalikan oleh sindikat Nigeria yang berbasis di Nigeria menggunakan kurir wanita Indonesia. Pengungkapan kasus besar ini merupakan hasil kerja sama yang efektif dan efisien antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Badan Narkotika Nasional dan Direktorat Jenderal Imigrasi.⁷

⁷ Admin Web Bea dan Cukai, Kerjasama Bea Cukai dengan BNN dan Imigrasi Bongkar Sindikat Nigeria, <https://www.beacukai.go.id/berita/kerjasama-bea-cukai-dengan-bnn-dan-imigrasi-bongkar-sindikat-nigeria.html> Accessed on Sunday, 4 July 2021 20:45 P.M

⁸ Sri Nurganingsih, "Kemenkumham Siap Buka Layanan Imigrasi di PLBN", [https://rm.id/baca-](https://rm.id/baca-berita/government-action/20331/cegah-terorisme-dan-perdagangan-orang-kemenkumham-siap-buka-layanan-imigrasi-di-plbn)

Selain itu, pada 2018, Kementerian Hukum dan HAM terus memperketat pengawasan keluar masuk WNA dan WNI melalui wilayah perbatasan. Kementerian Hukum dan HAM siap memberikan pelayanan keimigrasian di seluruh Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Saat ini, imigrasi di beberapa PLBN dapat melayani imigrasi untuk pembuatan paspor bagi WNI. Sebelumnya, layanan ini hanya melewati lintas batas. Dalam kebijakan ini, Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Bea Cukai, Karantina, dan Kepolisian. Oleh karena itu, dengan bantuan instansi perbatasan lainnya, pengawasan di perbatasan perlu terus ditingkatkan agar tidak ada lagi celah saat melakukan pengawasan keimigrasian terhadap WNI dan WNA yang melintas.⁸

Menurut pernyataan tersebut, integrasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan instansi perbatasan lainnya diperlukan untuk menjadikan pelayanan Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi lebih baik. Pasalnya, dengan munculnya kerja sama itu, masih banyak orang asing yang datang ke Indonesia tanpa dokumen hukum atau masuk tanpa izin.

[berita/government-action/20331/cegah-terorisme-dan-perdagangan-orang-kemenkumham-siap-buka-layanan-imigrasi-di-plbn](https://www.beacukai.go.id/berita/government-action/20331/cegah-terorisme-dan-perdagangan-orang-kemenkumham-siap-buka-layanan-imigrasi-di-plbn) Accessed on Sunday, 4 July 2021 21:19 P.M

Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi tidak selalu dapat bekerja sendirian ketika semua orang asing yang melakukan kejahatan besar bekerja sama dengan baik untuk mengelabui pemerintah. Bukan hanya karena integrasi antara lembaga perbatasan lainnya dapat menangani kejahatan, tetapi juga dapat menangani pencegahan terhadapnya. Itu karena hubungan di antara mereka akan menakuti orang asing yang ingin melakukan sesuatu yang dapat membahayakan negara kita. Informasi tentang bagaimana mereka bekerja dan berapa banyak mereka datang ke Indonesia dapat berasal dari sumber mana pun di antara mereka dan informasi itu dapat digunakan oleh mereka untuk menangkap orang asing tersebut ketika saatnya telah tiba.

3.2 Kendala Saat Terjadinya Kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi Dengan Lembaga Perbatasan Di Indonesia

Upaya Kerjasama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Lembaga perbatasan lain di Indonesia memiliki banyak alasan yang terkandung di dalamnya, termasuk alasan dimana daerah-daerah perbatasan di Indonesia sangatlah rawan dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab pun juga barang-barang illegal yang dapat membahayakan stabilitas negara. Selain keberadaan Konsep perbatasan yang begitu masif membuat setiap negara

yang berkonflik tentu akan membuat setiap warga negara nya beralih ke negara lain. Disinilah *border management* bagi setiap negara diperlukan bukan hanya secara teknologi namun keseluruhan makna dari border management yaitu tentang manajemen sdm yang berfungsi mengatur arus lalu lintas manusia agar terseleksi dengan baik disinilah peran petugas perbatasan di lakukan. Era pengungsi juga tidak dapat dihindari sebab diketahui setiap negara yang berkonflik maka masyarakat nya banyak yang menjadi pengungsi di negara lain. Konsep perbatasan yang rawan akan pengungsi akan menimbulkan masalah baru seperti penyelundupan manusia dan perdagangan manusia. Maka dari itu konsep perbatasan dan pengaturan perbatasan merupakan hal yang penting bagi setiap negara.

Konsep Perbatasan yang baik bukan hanya menerima pengungsi saja tetapi harus juga memperhatikan kelayakan hidup pengungsi tersebut salah satunya dengan memperdayakan mereka yang terlihat oleh Negara Yordania yang menjadi tempat mengungsi warga negara dari Suriah Dalam hal ini, terdapat beberapa segmen batas negara wilayah darat dan laut hingga kini masih belum tuntas. Masih terdapat segmen bermasalah berupa Outstanding Boundary Problems (OBP), Unresolved, Unsurveyed dan sejumlah batas maritim yang belum dapat diselesaikan. Karena itu, kondisi kawasan

perbatasan yang belum sepenuhnya aman dan tertib menyebabkan sering terjadi kasus-kasus pelanggaran batas negara dan lintas batas negara yang berpotensi merugikan negara. Secara fisik maupun arus komunikasi/informasi, banyak kawasan perbatasan masih terisolir. Masih pula banyak desa-desa tertinggal pada kawasan perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar (PPKT), karena terbatasnya infrastruktur/sarana prasarana pelayanan publik.

Selain itu, kendala dalam menjalankan tugasnya lembaga lembaga perbatasan tersebut adalah luas dari wilayah kerjanya, dikarenakan negara indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki luas wilayah yang begitu besar, menyulitkan petugas dan lembaga lembaga tersebut untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh dan ketat. Kurangnya fasilitas pendukung seperti alat angkut dan senjata pertahanan diri di perbatasan indonesia yang dimana lembaga lembaga tersebut masih memerlukan bantuan dari TNI jika terjadi kontak senjata atau ancaman yang tinggi. Ditambah lagi berbagai lembaga perbatasan tersebut berada di bawah naungan yang berbeda beda sehingga setiap koordinasi dari tiap lembaga sedikit sulit karena harus melalui berbagai proses yang cukup rumit dikarenakan berbedanya kementerian atau instansi yang menaunginya.

Oleh karena itu, untuk menanggulangi permasalahan tersebut suatu negara harus memiliki konsep border boundary dan border management yang baik sehingga negara tidak dirugikan serta tidak mengganggu kedaulatan negara. Konsep dari *border boundary* dan *border management* yang baik tersebut dapat berupa koordinasi yang baik antar instansi yang berkaitan langsung dengan manajemen perbatasan itu sendiri seperti Bea Cukai, Imigrasi dan Badan Pengelola Perbatasan.

IV. KESIMPULAN

Terhadap pernyataan dari bagian pendahuluan dan pembahasan esai ini, kita dapat melihat dampak dari integrasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan instansi lain, terutama instansi yang menangani perbatasan seperti BNPP, Bea Cukai, dan Karantina. Bayangkan jika Ditjen Imigrasi bekerja sendiri, saya kira akan butuh waktu lama untuk menyelesaikan satu kasus dibandingkan dengan jika Ditjen Imigrasi bekerja sama dengan instansi lain. Palsunya, bantuan dari instansi lain akan membuat pekerjaan Ditjen Imigrasi dapat fokus pada cabangnya sendiri yaitu keimigrasian yang mengurus izin masuk dan keluar orang asing, peraturan orang asing yang bermasalah, atau bahkan mendeportasi dan menjebloskan orang asing yang bermasalah tersebut ke penjara. Tapi, perlu diingat bahwa, seiring waktu, banyak orang asing juga telah meningkatkan teknologi dan pengetahuan

mereka untuk mengelabui pemerintah. Oleh karena itu integrasi Direktorat Jenderal Imigrasi dengan instansi lain harus ditingkatkan ke relasi yang lebih besar, tidak hanya instansi perbatasan, tetapi juga teknologi dan ilmu pengetahuan.

Dalam pandangan saya, kerja sama Imigrasi di Indonesia masih belum optimal karena masih banyak kasus-kasus yang bisa dihindari, seperti penyelundupan manusia atau terorisme. Sebab, sistem yang ada masih belum memadai dengan fasilitas yang kurang optimal, seperti jumlah kantor yang sedikit, kekurangan staf, dan lambatnya akses simkim. Oleh karena itu, diharapkan adanya kerja sama keimigrasian dengan sektor lain di Indonesia dapat membantu efektivitas sektor keimigrasian. Integritas dan koordinasi antar instansi terkait seperti Bea Cukai, Karantina, dan BNPP harus ditingkatkan agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Selain itu, penting bagi DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI untuk mengambil pendekatan lebih lanjut terhadap pengelolaan pengendalian perbatasan di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat pekerjaan yang efisien dan maksimal oleh lembaga kontrol perbatasan yang sudah didirikan di Indonesia seperti CIQ dan BNPP seperti yang saya jelaskan sebelumnya, meningkatkan jumlah lembaga kontrol perbatasan di Indonesia, atau bahkan menerapkan kebijakan nasional lainnya tentang kontrol perbatasan. Menerapkan kebijakan negara lain seperti

yang dilakukan AS terhadap badan kontrol perbatasan mereka di mana sektor swasta di negara mereka dapat berpartisipasi menuju manajemen kontrol perbatasan di negara tersebut, jadi apa pun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hertanto, 2005 "Human Trafficking: Akar Permasalahan dan Solusinya" Jakarta: Sinar Grafika.

Web site

Kanwil NTT, Bersama BNPP, Kanim Atambua Tingkatkan Standar Pelayanan Keimigrasian Berbasis Teknologi Informasi, <https://ntt.kemerkumham.go.id/berita-kanwil/berita-upt/4645-bersama-bnpp-kanim-atambua-tingkatkan-standar-pelayanan-keimigrasian-berbasis-teknologi-informasi> Accessed on Thursday, 15 April 2021 21:32 P.M

Sri Nurganingsih, "Kemerkumham Siap Buka Layanan Imigrasi di PLBN", <https://rm.id/baca-berita/government-action/20331/cegah-terorisme-dan-perdagangan-orang-kemerkumham-siap-buka-layanan-imigrasi-di-plbn> Accessed on Sunday, 4 July 2021 21:19 P.M

Admin Web Bea dan Cukai, Kerjasama Bea Cukai dengan BNN dan Imigrasi Bongkar Sindikat Nigeria, <https://www.beacukai.go.id/berita/kerja-sama-bea-cukai-dengan-bnn-dan-imigrasi-bongkar-sindikat-nigeria.html> Accessed on Sunday, 4 July 2021 20:45 P.M

<https://merauke.imigrasi.go.id/sinergitas-ciq-customs-immigration-quarantine-kab->

merauke-dalam-rangka-peringatan-
ulang-tahun-ke-74-republik-indonesia/

Accessed on Thursday, 15 April 2021
18:55 P.M